

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 JANUARI 2019

FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka kriminalitas	<p>Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000</p> $\frac{\text{Angka kriminalitas yang tertangani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Pendidikan 4. Satpol PP 5. Dinas Pemuda Dan Olahraga 6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Pertumbuhan Penduduk 	<p>$IPM = \sqrt[3]{I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran}}$</p> <p>$\text{Pertumbuhan Penduduk} = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$</p> <p> P_t = Jumlah Penduduk pada Tahun t P_0 = Jumlah Penduduk pada Tahun dasar t = Periode Waktu antara Tahun Dasar dan Tahun T (dalam tahun) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 3. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 4. Dinas Kesehatan 5. RSUD Ratu Zalecha 6. Dinas Ketahanan Pangan 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 8. Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>jumlah pengangguran terbuka adalah usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100 %</p> $\text{Tingkat pengangguran terbuka} = \frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan	$\text{Persentase Penduduk Miskin} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	<p>1. $R = H \times V (E)/C$ "R : Risk (Risiko), Pengertian risiko: (1) Risiko adalah peluang untuk rugi. (2) Risiko adalah kemungkinan kehilangan. (3) Risiko adalah ketidakpastian (uncertainty). (4) Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan, Bencana (Disaster)"</p> <p>V : Vulnerability (kerentanan)</p> <p>E : Elemen berisiko</p> <p>C : Capacity (kapasitas) kemampuan masyarakat mengatasi bencana</p> <p>Jika suatu kejadian sudah terjadi dan kejadian tersebut mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu dinyatakan sebagai BENCANA, bukan risiko mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu</p>	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	<p>1. Laju pertumbuhan ekonomi</p> <p>2. Indeks Gini</p> <p>3. Laju inflasi</p>	<p>Pertumbuhan PDRB</p> $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p> <p>Indeks Gini</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p> <p>Laju inflasi</p> $[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_3)]^{1/3} - 1$ <p>Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n Inf_(n+1) = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...</p>	<p>1. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura</p> <p>2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>3. Dinas Peternakan Dan Perkebunan</p> <p>4. Dinas Perikanan</p> <p>5. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro</p> <p>6. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>7. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</p> <p>8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB									
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	<p>Formulasi Indeks LH</p> <p>$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$</p> <p>Keterangan:</p> <p>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <table><tr><td>Peningkatan Kualitas Air</td><td>Indeks</td><td>$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$<p>Rumus metode IP:</p>$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$<p>$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)</p><p>$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan</p><p>$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang</p><p>$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p></td></tr><tr><td>Peningkatan Kualitas Udara</td><td>Indeks</td><td>$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$</td></tr><tr><td>Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan</td><td>Indeks</td><td>$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$<p>dimana:</p><p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p><p>TH = Tutupan Hutan</p></td></tr></table>	Peningkatan Kualitas Air	Indeks	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$ <p>$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)</p> <p>$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan</p> <p>$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang</p> <p>$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p>	Peningkatan Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana:</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>TH = Tutupan Hutan</p>	1. Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kualitas Air	Indeks	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$ <p>$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)</p> <p>$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan</p> <p>$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang</p> <p>$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p>											
Peningkatan Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$											
Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana:</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>TH = Tutupan Hutan</p>											
8.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	persentase jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan perhubungan ditambah persentase sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi	1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan									

9.	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase permukiman layak huni	penjumlahan persentase bobot dari komponen permukiman layak huni yaitu 40% cakupan rumah layak huni ditambah 30% lingkungan permukiman yang nyaman ditambah 30% pemanfaatan tata ruang dan bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Dan Permukiman 2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Satpol PP
No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	<p>Akumulasi penilaian program-program reformasi birokrasi sebagai komponen pengungkit dengan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.</p> <p>Komponen pengungkit terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3. Penataan Dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen Sdm 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>Komponen Hasil terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn 3. Kualitas Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 6. Pemerintah Desa 7. Kecamatan 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 9. Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP) 10. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 12. Satpol PP 13. Dinas Pertanahan 14. Rsud Ratu Zalecha

				15.Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 16.Dinas Pendapatan 17.Sekretariat Daerah 18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN